

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Adanya pengaruh secara bersama dan signifikan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2018. Sedangkan secara bersama pengaruh kelima variabel tersebut adalah 90% dan sisanya 10%. Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2018. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien sebesar 0,519579 dan probabilitas sebesar 0,0000.
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2018. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien sebesar -0,106921 dan probabilitas sebesar 0,0153.
4. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-

2018. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien sebesar 0,217739 dan probabilitas sebesar 0,0000.

5. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2018. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien sebesar 0,105833 dan probabilitas sebesar 0,1785.
6. Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2018. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien sebesar 0,835869 dan probabilitas sebesar 0,2663.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian di atas maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah setiap tahunnya yang dialokasikan untuk kebutuhan fisik sarana yang menjadi prioritas nasional serta untuk bidang pendidikan dan kesehatan yang mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Karena dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan belanja modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat.
2. Dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat perlu adanya transparansi dan pengawasan dari pemerintah pusat. Sehingga dengan adanya pengawasan dari pemerintah

pusat dapat digunakan dengan tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap belanja modal yang sesuai dengan kebutuhan dari daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat.

3. Mengingat sangat pentingnya Dana Alokasi Khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah setiap tahunnya sebagai sumber dalam pembelanjaan daerah, penggunaan Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat harus sesuai dengan prioritas pembangunan di daerah tersebut.
4. Sebaiknya pemerintah pusat harus meningkatkan alokasi Dana Bagi Hasil untuk pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat, karena Dana Bagi Hasil setiap tahunnya selalu mengalami penurunan, akibatnya tidak mempengaruhi Belanja Modal. Untuk meningkatkan Belanja Modal pemerintah daerah perlu tambahan alokasi Dana Bagi hasil dari pemerintah pusat.
5. Mengingat setiap tahunnya jumlah penduduk semakin meningkat juga akan meningkatkan belanja pemerintah daerah, oleh karena itu penggunaan anggaran APBD harus sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat dan sesuai dengan prioritas daerah.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan studi dan diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih baik dari penelitian ini. Berikut adalah saran untuk penelitian selanjutnya :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan rentang waktu yang lebih jauh agar dapat melihat lebih baik pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi hasil (DBH) dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal pada periode pemerintahan yang berbeda-beda.
2. Keterbatasan data membuat variabel penelitian kurang detail dalam menjelaskan pendapatan daerah dan jumlah penduduk terhadap belanja modal, dengan adanya data yang lebih detail seperti besaran penyerapan dana perimbangan dan laporan realisasi penggunaan dana perimbangan akan membuat hasil penelitian lebih baik dalam menjelaskan kebijakan penggunaan apa saja yang memberikan pengaruh terhadap pengurangan angka kemiskinan di Sumatera Barat.

